



## **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN UMKM DI DESA LEMBANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Yudi Kusnadi<sup>1)</sup>, Arlan Siddha<sup>2)</sup>, Harky Ristala<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan UMKM di Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masalah peran penting pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan UMKM sebagai salah satu sektor strategis dalam peningkatan ekonomi lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang ditempuh pemerintah desa dalam pengembangan UMKM, bentuk dukungan keberlanjutan usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, pengurus Forum UMKM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku UMKM, serta masyarakat Desa Lembang. Data tersebut kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pengembangan UMKM di Desa Lembang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, pemberian dukungan keberlanjutan usaha melalui bantuan fasilitas, promosi produk, serta kolaborasi dengan organisasi lokal. Selain itu, ditemukan pula beberapa tantangan, antara lain keterbatasan modal, kurangnya fasilitasi berkelanjutan, serta keterbatasan akses pasar dan pemanfaatan teknologi digital.

**Kata Kunci:** Strategi Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, Ekonomi Desa.

### **Abstract**

*This research is entitled “Village Government Strategy in Improving Community Economy through the Development of MSMEs in Lembang Village, Lembang District, West Bandung Regency”. The background of this study departs from the crucial role of village governments in empowering communities through the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as one of the strategic sectors in strengthening the local economy. The purpose of this research is to identify the strategies undertaken by the village government in MSME development, the forms of support for business sustainability, and the challenges faced in the empowerment process. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data*

*were collected through interviews with the village head, the MSME Forum administrators, community leaders, youth figure, organization, MSME actors, as well as the local community of Lembang Village. The data were then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that the strategies of the village government in developing MSMEs in Lembang Village include community empowerment through training and mentoring, providing support for business sustainability through facilities assistance, product promotion, and collaboration with local organizations. In addition, several challenges were identified, such as limited access to capital, lack of sustainable facilitation, as well as limited market access and digital technology utilization.*

**Keywords:** *Village Government Strategy, Community Empowerment, MSMEs, Village Economy.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Salah satu instrumen yang berperan besar dalam peningkatan ekonomi desa adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, minimnya inovasi, dan rendahnya akses pasar, terutama di daerah pedesaan.

Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pariwisata, kuliner, dan kerajinan tangan. Namun, berdasarkan data Pemerintah Desa Lembang tahun 2024, dari total 52 UMKM yang tercatat, hanya 13 yang memiliki legalitas usaha resmi dan 17 yang aktif memproduksi. Rendahnya omzet rata-rata per bulan yang berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp3.800.000 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berskala mikro dan belum memiliki daya saing kuat.

Upaya Pemerintah Desa Lembang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM telah dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan kewirausahaan dasar, bantuan modal bergulir, pendampingan legalitas usaha, serta promosi produk melalui pameran desa. Namun, program-program tersebut masih terbatas jangkauannya dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah,

berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal agar pengembangan UMKM benar-benar mampu meningkatkan ekonomi desa secara menyeluruh.

Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Lembang belum berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai permasalahan seperti rendahnya omzet dan skala usaha sebagian besar UMKM, terbatasnya akses terhadap modal dan perizinan usaha, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dari pihak pemerintah desa. Selain itu, rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran juga menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya strategi pemerintah desa yang lebih inovatif, terencana, dan partisipatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pada kajian mengenai strategi pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Lembang serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk pengembangan UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha di tingkat desa dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya untuk menggambarkan secara mendalam strategi dan peran pemerintah desa dalam pengembangan UMKM. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Lembang, pengurus Forum UMKM, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM aktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Desa Lembang merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena didukung oleh sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Desa ini terletak di kawasan dataran tinggi dengan luas wilayah sekitar 2.350 hektare dan jumlah penduduk lebih dari 15.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa pariwisata, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil seperti kuliner, kerajinan tangan, dan konveksi rumahan. Potensi sumber daya alam dan letak strategis yang dekat dengan pusat wisata menjadi peluang besar bagi tumbuhnya UMKM berbasis lokal.

Pemerintah Desa Lembang memiliki visi untuk “mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui pengembangan potensi ekonomi desa”. Salah satu fokus utama dalam visi tersebut adalah penguatan sektor UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat. Berdasarkan data laporan desa tahun 2024, terdapat 52 UMKM yang tersebar di berbagai bidang, seperti kuliner, kerajinan, jasa jahit, dan toko kelontong. Namun, hanya 13 yang memiliki izin usaha resmi, sementara selebihnya masih beroperasi secara informal.

### **Strategi Pemerintah Desa yang Sistematis dan Terencana**

Pemerintah Desa Lembang telah merumuskan strategi pengembangan UMKM dengan pendekatan yang sistematis dan terencana. Strategi ini dirancang agar tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Wahab (2017) menegaskan bahwa strategi pemerintah daerah yang baik harus dirumuskan secara sistematis, terencana, berbasis kondisi lokal, melibatkan masyarakat, dan berorientasi pada pemberdayaan. Prinsip-prinsip tersebut telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Lembang dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat. Strategi yang sistematis dan terencana menjadi pondasi penting bagi pengembangan UMKM di tingkat lokal.

Perencanaan yang baik menghasilkan arah kebijakan yang jelas, berkelanjutan, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Zuli Kasmawanto (2023) yang menyatakan bahwa strategi desa mandiri diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, pengembangan BUMDes, serta pelibatan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Senada dengan itu, Najmudin dan Sunyoto (2025) menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengembangan UMKM berbasis potensi lokal mampu memperkuat struktur ekonomi desa secara mandiri.

Selain itu, menurut Sastika dan Mayasiana (2022), pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes menekankan pentingnya strategi manajemen yang berbasis program, anggaran, dan prosedur yang terukur. Riyanto (2019) juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki strategi terencana dalam pemberdayaan UMKM—melalui fasilitasi modal, pelatihan manajerial, akses pasar, dan penyederhanaan perizinan—dapat meningkatkan kapasitas usaha masyarakat secara signifikan. Dengan demikian, strategi Pemerintah Desa Lembang yang sistematis dan terencana tidak hanya dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, serta masyarakat. Strategi ini menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, pelibatan aktif masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan agar pengembangan UMKM benar-benar efektif dan berkesinambungan. Prinsip tersebut sesuai dengan teori Wheelen dan Hunger (2018) yang menekankan bahwa strategi yang baik harus disertai program, anggaran, dan prosedur yang jelas agar implementasinya dapat berjalan efektif.

Pemerintah Desa Lembang juga telah menunjukkan komitmen dalam melibatkan Forum UMKM sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat melalui forum ini mencerminkan penerapan pendekatan partisipatif yang direkomendasikan oleh Wahab (2017). Melalui pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, strategi desa menjadi lebih membumi, sesuai dengan kebutuhan lapangan, serta berorientasi pada hasil nyata. Secara keseluruhan, strategi pemerintah desa yang sistematis dan terencana di Desa Lembang telah menunjukkan arah kebijakan yang jelas,

berbasis data, dan melibatkan masyarakat secara langsung. Meskipun demikian, penguatan masih diperlukan pada aspek tindak lanjut, monitoring, dan pendampingan agar dampak program terhadap pengembangan UMKM lebih merata dan berkelanjutan.

### **Strategi yang Mencakup Perumusan Kebijakan, Implementasi, dan Evaluasi**

Strategi pengembangan UMKM di Desa Lembang tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi mencakup siklus kebijakan yang meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi. Wahab (2017) menyebutkan bahwa strategi yang efektif harus melewati ketiga tahapan tersebut agar mampu berjalan secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

#### **1. Perumusan Kebijakan**

Tahap perumusan kebijakan merupakan pondasi utama keberhasilan program. Pemerintah Desa Lembang menyusun kebijakan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan aspirasi yang diperoleh melalui musyawarah desa. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes sebagai landasan hukum pelaksanaan program. Perumusan kebijakan di Desa Lembang juga berupaya menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta lembaga desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dibuat secara top-down, melainkan berdasarkan hasil musyawarah yang membahas kebutuhan dan prioritas bersama. Namun, tantangan masih ada dalam hal inklusivitas partisipasi. Sebagian masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan desa cenderung belum terlibat langsung dalam proses perumusan. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk memperluas keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar strategi pembangunan lebih representatif dan inklusif.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Tahap implementasi strategi diwujudkan dalam berbagai program nyata yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

Bentuk implementasi meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan usaha, seperti manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk;
- b. Bantuan sarana produksi, berupa alat usaha dan dukungan logistik;
- c. Fasilitasi promosi produk lokal melalui media sosial, pameran, dan bazar desa;
- d. Kemitraan dengan pihak eksternal, seperti BUMDes, koperasi, dan lembaga pelatihan.

Meskipun implementasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam pemerataan akses dan sosialisasi program. Beberapa pelaku usaha belum mendapatkan informasi atau kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi, optimalisasi sumber daya, dan pemerataan manfaat agar kebijakan benar-benar inklusif bagi seluruh pelaku UMKM. Hal tersebut sesuai dengan teori Edwards III (dalam Nugroho, 2017), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pemerintah Desa Lembang telah menunjukkan kemajuan dalam penyediaan sumber daya dan program, namun perlu memperkuat komunikasi serta mekanisme tindak lanjut agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif.

## **3. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus kebijakan yang berfungsi menilai efektivitas dan efisiensi program. Di Desa Lembang, evaluasi dilakukan melalui pemantauan hasil program, laporan kegiatan, serta musyawarah desa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan yang dapat dijadikan dasar penyusunan strategi berikutnya. Namun, evaluasi di Desa Lembang masih bersifat sederhana dan belum terdokumentasi secara formal. Pemerintah desa sudah

menunjukkan kesadaran akan pentingnya evaluasi, tetapi belum memiliki sistem dan instrumen evaluasi yang terstruktur. Berdasarkan teori William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan seharusnya mencakup lima aspek utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Program pengembangan UMKM di Desa Lembang sudah cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha, tetapi belum efisien karena keterbatasan anggaran dan kurangnya sistem monitoring. Selain itu, dari sisi responsivitas, evaluasi menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang belum terjangkau oleh program. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih partisipatif, transparan, dan terdokumentasi untuk memastikan kebijakan ke depan lebih tepat sasaran serta berkelanjutan.

### **Pendekatan Berbasis Kondisi Lokal dan Kebutuhan Masyarakat**

Pendekatan berbasis kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat merupakan prinsip utama dalam strategi pembangunan desa. Wahab (2017) menyebutkan bahwa strategi pemerintah daerah tidak boleh bersifat seragam, tetapi harus disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat setempat.

#### **1. Potensi Lokal Desa**

Desa Lembang memiliki potensi alam, sosial, dan ekonomi yang besar. Letaknya yang strategis di kawasan wisata menjadikan desa ini memiliki peluang tinggi untuk pengembangan UMKM, terutama di sektor pertanian, kuliner, dan kerajinan. Selain sumber daya alam, potensi sosial berupa semangat gotong royong, kreativitas masyarakat, dan partisipasi warga menjadi modal penting untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Generasi muda Desa Lembang juga telah menunjukkan kreativitas melalui berbagai inovasi usaha, seperti minuman kekinian dan produk lokal lainnya. Namun, pengelolaan potensi ini belum sepenuhnya optimal, terutama dalam integrasi dengan sektor pariwisata. Kolaborasi antara UMKM lokal dan pelaku wisata masih terbatas, sehingga diperlukan strategi yang lebih terstruktur dalam pengembangan produk, branding, serta akses ke pasar wisata.

## **2. Kebutuhan Nyata Masyarakat**

Kebutuhan utama masyarakat Desa Lembang berfokus pada tiga aspek:

1. Akses permodalan yang merata bagi pelaku UMKM;
2. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan;
3. Program pembangunan yang inklusif dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa program pelatihan yang telah dilakukan pemerintah desa sudah bermanfaat, tetapi masih diperlukan dukungan modal dan bimbingan usaha yang lebih luas. Kelompok ibu rumah tangga dan pemuda yang ingin memulai usaha juga membutuhkan pendampingan agar mampu berwirausaha secara mandiri. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, strategi desa akan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, sekaligus menciptakan pemerataan manfaat ekonomi di tingkat lokal.

## **3. Kesesuaian Strategi dengan Kebutuhan Lokal**

Secara umum, strategi pemerintah Desa Lembang telah selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Program pelatihan, bantuan sarana, dan promosi produk mencerminkan upaya pemerintah desa untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal akses modal dan pemerataan manfaat program.

Selain itu, potensi besar sektor wisata belum dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan integrasi antara strategi pengembangan UMKM dan sektor pariwisata agar nilai tambah ekonomi desa semakin meningkat. Dengan penyelarasan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis potensi lokal, strategi pengembangan ekonomi di Desa Lembang dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Aktif**

Partisipasi masyarakat secara aktif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan strategi pengembangan UMKM di tingkat desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak

yang ikut menentukan arah, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan partisipasi aktif, kebijakan desa menjadi lebih relevan, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahab (2017) yang menegaskan bahwa strategi pembangunan yang baik harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

### **1. Partisipasi dalam Perumusan Strategi**

Partisipasi masyarakat dalam tahap perumusan strategi merupakan langkah penting agar kebijakan pemerintah desa benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal. Melalui forum musyawarah desa, diskusi kelompok, dan mekanisme aspirasi warga, terjadi pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Proses ini membantu pemerintah desa memahami potensi, kendala, dan prioritas masyarakat dalam pengembangan UMKM. Keterlibatan sejak tahap awal menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*), yang berpengaruh positif terhadap tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, partisipasi ini sering kali belum merata. Sebagian warga aktif berpartisipasi, sementara lainnya hanya menerima informasi setelah keputusan diambil. Faktor kesibukan, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya ruang diskusi menjadi kendala yang menyebabkan partisipasi belum inklusif. Hal ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan partisipasi melalui pendekatan yang lebih terbuka, seperti penyediaan waktu musyawarah yang fleksibel, pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi, serta penguatan peran lembaga masyarakat dalam menjaring aspirasi warga. Dengan demikian, perumusan strategi pengembangan UMKM dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan representatif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

### **2. Peran Organisasi dan Komunitas Lokal**

Selain melalui forum formal, partisipasi masyarakat juga terwujud melalui peran organisasi dan komunitas lokal seperti Forum UMKM, PKK, RW, dan Karang Taruna. Keterlibatan lembaga-lembaga ini menunjukkan

bahwa pemerintah desa menyadari pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi. Forum UMKM berfungsi sebagai wadah koordinasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama dalam hal penyebaran informasi, pelatihan, dan promosi produk lokal. Sementara itu, PKK dan Karang Taruna berperan dalam memperluas jangkauan promosi melalui kegiatan sosial dan media digital. Pola kolaboratif ini mencerminkan penerapan prinsip *bottom-up planning*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima program, tetapi juga subjek yang turut mengelola dan mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayahnya. Namun, partisipasi organisasi masyarakat masih perlu diperkuat dalam hal fasilitasi dan dukungan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu menyediakan sarana, pendampingan, serta anggaran yang memadai agar organisasi seperti Karang Taruna dan PKK dapat lebih optimal berkontribusi. Dengan dukungan tersebut, peran komunitas lokal dapat semakin produktif dalam memperluas dampak positif strategi pengembangan UMKM di Desa Lembang.

### **3. Tantangan dalam Mewujudkan Partisipasi Aktif**

Meskipun partisipasi masyarakat di Desa Lembang tergolong cukup aktif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, konsistensi keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala karena kesibukan dan keterbatasan waktu membuat sebagian warga tidak dapat terlibat secara rutin. Kedua, kapasitas sumber daya manusia masih bervariasi, terutama dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Akibatnya, partisipasi sering bersifat formal dan belum produktif secara ekonomi. Ketiga, dukungan fasilitas dan koordinasi antarorganisasi belum optimal. Meskipun terdapat beberapa lembaga yang berperan aktif, kurangnya sinergi menyebabkan program berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi secara efektif. Tantangan keempat adalah rendahnya rasa kepemilikan sebagian masyarakat terhadap program pengembangan ekonomi, karena masih ada pandangan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemerintah desa. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui

pelatihan manajerial dan kewirausahaan, fasilitasi berkelanjutan, serta sistem koordinasi antarorganisasi yang terstruktur. Dengan partisipasi yang lebih bermakna, masyarakat dapat menjadi motor utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi berbasis lokal secara berkelanjutan.

### **Berorientasi pada Pemberdayaan dan Keberlanjutan Ekonomi**

Prinsip utama strategi pembangunan menurut Wahab (2017) adalah bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan secara ekonomi. Dalam konteks Desa Lembang, strategi pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mandiri, berdaya saing, dan mampu menjaga keberlanjutan usahanya tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah.

#### **1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Pendampingan**

Pemerintah Desa Lembang menerapkan berbagai program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. Kegiatan ini meliputi pelatihan manajemen keuangan, pengembangan produk, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital. Melalui pelatihan tersebut, pelaku usaha memperoleh pengetahuan praktis dalam mengelola dan mengembangkan bisnis secara profesional.

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan Forum UMKM sebagai mitra strategis dalam koordinasi, konsultasi, dan penyebaran informasi. Pendekatan ini mencerminkan model pemberdayaan yang partisipatif, di mana masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Namun, meskipun pelatihan dan pendampingan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan, dukungan dalam hal akses permodalan masih menjadi kendala utama. Tanpa dukungan finansial yang memadai, potensi keberlanjutan usaha masyarakat sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, lembaga keuangan mikro, dan organisasi masyarakat perlu diperkuat untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

## **2. Dukungan untuk Keberlanjutan Usaha**

Dukungan pemerintah desa terhadap keberlanjutan usaha diwujudkan melalui berbagai program yang bersifat jangka panjang. Pemerintah desa tidak hanya memberikan pelatihan dan bantuan alat produksi, tetapi juga mengupayakan promosi produk lokal melalui pameran, bazar, dan media sosial. Selain itu, kolaborasi dengan Forum UMKM, PKK, dan Karang Taruna membantu memperluas jaringan pemasaran serta memperkuat daya saing produk lokal. Upaya keberlanjutan juga dilakukan melalui pelatihan lanjutan yang menekankan aspek pemasaran digital dan pengemasan produk. Program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai jual produk UMKM Desa Lembang. Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam kapasitas dan promosi, masih dibutuhkan langkah nyata dalam penguatan ekosistem usaha, seperti pengelolaan rantai pasok dan dukungan kebijakan desa yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Dengan dukungan yang konsisten, keberlanjutan usaha UMKM di Desa Lembang dapat lebih terjamin, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal secara jangka panjang.

## **3. Tantangan dalam Pemberdayaan dan Keberlanjutan**

Beberapa tantangan masih dihadapi dalam upaya pemberdayaan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di Desa Lembang. Pertama, keterbatasan akses modal usaha menjadi faktor penghambat utama. Banyak pelaku UMKM yang telah memiliki kemampuan, namun tidak dapat memperluas usahanya karena keterbatasan dana. Kedua, pelaksanaan pendampingan berkelanjutan masih belum optimal. Program pelatihan sering kali bersifat insidental dan belum memiliki tindak lanjut yang terstruktur. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal manajemen usaha dan adaptasi terhadap teknologi digital. Keempat, koordinasi antar lembaga masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan belum sepenuhnya sinergis, sehingga upaya pengembangan terkadang berjalan terpisah tanpa kesinambungan yang kuat. Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi ke depan perlu mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan dengan kebijakan ekonomi

desa yang berpihak pada UMKM. Pemerintah desa perlu memperkuat dukungan kelembagaan, menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan, serta memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan dan sektor swasta. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Desa Lembang dapat menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Desa Lembang dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang diarahkan pada penguatan ekonomi lokal. Strategi yang diterapkan meliputi perencanaan berbasis potensi lokal, pelatihan kewirausahaan, pendampingan legalitas usaha, pemberian bantuan modal, dan promosi produk UMKM. Implementasi strategi tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha dan munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian ekonomi. Namun demikian, strategi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, minimnya pelatihan lanjutan, serta belum terintegrasinya program UMKM dengan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes). Secara konseptual, strategi Pemerintah Desa Lembang telah sejalan dengan prinsip teori pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2009) dan pembangunan ekonomi lokal (Sjafrizal, 2010), di mana pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat serta pemanfaatan potensi lokal. Namun untuk mencapai keberlanjutan, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan kolaboratif antara pemerintah desa, BUMDes, serta lembaga eksternal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rafika, (2010). *Pengertian UKM menurut Suhardjono*. [Publisher/Institution].
- Rahmawati, D., & Putra, A. R. (2022). *Tantangan dan peluang UMKM di era digital*. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 14(2), 123-135. <https://doi.org/xxxxxxx>
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic growth and human development. *World development*, 28(2), 197-219.
- Riyanto, A. (2019). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Olahan Mangga di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Brawijaya.

- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, masalah, dan strategi pemberdayaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Sastika, H. A., & Mayasiana, N. A. (2022). Strategi BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Wonoasri. *Villages: Journal of Villages Research and Studies*.